

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kurangnya gizi kronis pada 1000 hari pertama, hasil Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa tingkat stunting di Indonesia sebesar 30,8%. WHO menyatakan bahwasannya tingkat stunting di atas 20% merupakan masalah kesehatan masyarakat. Presentase orang yang terkena stunting di dunia saat ini cukup tinggi, apabila hal ini dibiarkan maka Indonesia akan kehilangan satu generasi produktif. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan metabolisme disebabkan karena stunting. Para Orang tua dihimbau untuk menimbang balita setiap bulan dan pergi ke posyandu untuk memantau perkembangan berat serta tinggi badan pada standar usianya juga untuk memastikan tumbuh kembang anak yang optimal. Banyak pihak yang harus terlibat bekerjasama untuk turut serta membantu menangani kasus stunting yang ada.<sup>1</sup>

Stunting adalah permasalahan gizi dunia khususnya negara berkembang, Dalam peraturan presiden nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa kondisi ini terjadi ketika anak mengalami kegagalan pertumbuhan dan perkembangan linear akibat kekurangan gizi dalam jangka Panjang secara global.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kemenkes RI, *Buku Saku Bebas Stunting* (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, 2020), <https://stunting.go.id/kominfo-buku-saku-bebas-stunting/>.

<sup>2</sup> Ayu Samliani and Sri Wahyu Handayani, "Strategy of The Women Empowerment Child Protection and Family Planning Agency (DP3AKB) In The Prevention and Reduction of Stunting in Simeulue

Stunting merupakan ancaman utama pada kualitas dan daya saing bangsa Indonesia Menurut WHO, stunting ini juga kondisi ketika anak mengalami keterhambatan pertumbuhan, sehingga masalah yang dialaminya tidak hanya soal pendek tetapi juga kekurangan gizi. Stunting ditandai dengan tinggi anak yang lebih pendek daripada standar usianya, dan dapat terjadi saat anak masih dalam kandungan serta pada masa pertumbuhannya. Ini pasti akan berdampak negatif pada kemampuan dan prestasi siswa, produktivitas, dan kreativitas di usia produktif. Istilah "stunting" mungkin tidak dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Stunting adalah masalah gizi buruk yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi yang terus menerus yang menyebabkan anak mengalami gangguan pertumbuhan, yaitu tinggi badan yang lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Sebelum sosialisasi, banyak masyarakat masih tidak memahami istilah "stunting" dan tidak tahu bagaimana melakukan praktik pemberian makan yang benar sesuai dengan yang direkomendasikan oleh WHO. Namun demikian, data menunjukkan bahwa peserta sosialisasi telah memahami definisi stunting dan cara menilai stunting pada anak. Mereka juga mengenal indikator praktik pemberian makan yang benar yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu memulai menyusui dini (1 jam setelah bayi lahir), menyusui eksklusif selama 6 bulan, menyusui lanjutan sampai usia 2 tahun, frekuensi pemberian makanan anak sesuai usia anak, dan memperhatikan keragaman makanan <sup>3</sup>

---

Regency," *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)* 5, no. 1 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.24076/jspg.v5i1.1123>.

<sup>3</sup> Anik Supriani et al., "Pemeriksaan Kesehatan Serta Sosialisasi Peningkatan Kesehatan Ibu Dan Anak Untuk Mencegah Stunting," *Jurnal Pengabdian Ilmu Kesehatan* 2, no. 3 (2022): 63–71, <https://doi.org/10.55606/jpikes.v2i3.704>.

Penyebab utama stunting adalah kurangnya asupan nutrisi selama masa pertumbuhan anak, baik saat dalam kandungan maupun setelah lahir. Stunting dapat dicegah dengan memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum dan selama kehamilan, serta selama 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi gizi ibu saat hamil, penyakit pada saat masih bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Anak yang mengalami stunting memiliki resiko rendahnya kemampuan kognitif dibandingkan dengan yang tidak terkena stunting.<sup>4</sup>

Stunting termasuk masalah global begitupun di Indonesia, Indonesia termasuk negara yang menduduki angka tertinggi terhadap permasalahan stunting di Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu target *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pemerintah Indonesia memprioritaskan penurunan stunting karena pemerintah memandang bahwa penurunan stunting harus dipercepat untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs), terutama Tujuan 2, yang mencakup menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi, serta meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting pada anak balita merupakan salah satu

---

<sup>4</sup> Erwina Sumartini, "Studi Literatur : Dampak Stunting Terhadap Kemampuan Kognitif Anak," *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan "Peran Tenaga Kesehatan Dalam Menurunkan Kejadian Stunting"* Tahun 2020 *Impact*, 2020, 127–34, [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Studi+Literatur+%3A+Dampak+Stunting+Terhadap+Kemampuan+Kognitif+Anak&btnG=.](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Studi+Literatur+%3A+Dampak+Stunting+Terhadap+Kemampuan+Kognitif+Anak&btnG=.)(01/05/23,08:57 WIB)

agenda utama pemerintah dalam mewujudkan SDGs, khususnya pada Tujuan yang ke-2.<sup>5</sup>

*Sustainable Development Goals* (SDGs) di cetuskan oleh Pemerintah dan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk mencapai kesadaran global mengenai pembangunan berkelanjutan ke-2. SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk membantu mengatasi kemiskinan, melindungi planet, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat selama 15 tahun ke depan. Indonesia, sebagai bagian dari anggota PBB, berkomitmen untuk menerapkan SDGs dan mencapai target-target yang ditetapkan dalam deklarasi.<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan PBB, organisasi masyarakat sipil, lembaga akademis, dan entitas sektor swasta untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) secara efektif melalui pendekatan terpadu. Negara anggota PBB terdiri dari 193 negara, termasuk Indonesia. PBB didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 dan bertujuan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia, meningkatkan kerja sama internasional, dan mengatasi tantangan global. Indonesia bergabung sebagai negara anggota ke-60 pada 28 September 1950. Sebagai anggota PBB,<sup>7</sup> Indonesia

---

<sup>5</sup> TP2S, "Hasil Perhitungan IKPS Nasional Dan Provinsi Tahun 2022," kementerian sekretariat Negara RI, Sekretariat Presiden, 2023, <https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/>.(01/05/23,09:10 WIB)

<sup>6</sup> Bintang Masnola Capah, Hadiyanto Abdul Rachim, and Santoso Tri Raharjo, "Implementasi Sdg'S-12 Melalui Pengembangan Komunitas Dalam Program Csr," *Share : Social Work Journal* 13, no. 1 (2023): 150, <https://doi.org/10.24198/share.v13i1.46502>.

<sup>7</sup> Muhammad Nuha Maulana Pasya, "Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menghadapi Sengketa Internasional," *Researchgate*, no. July (2021): 0–19, [https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Pasya/publication/353314853\\_PERAN\\_PERSERIKATAN\\_BANGSA-BANGSA\\_DALAM\\_MENGHADAPI\\_SENGKETA\\_INTERNASIONAL/links/60f2f026fb568a7098b92d2d/PERAN-PERSERIKATAN-BANGSA-BANGSA-DALAM-MENGHADAPI-SENGKETA-INTERNASIONAL.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Pasya/publication/353314853_PERAN_PERSERIKATAN_BANGSA-BANGSA_DALAM_MENGHADAPI_SENGKETA_INTERNASIONAL/links/60f2f026fb568a7098b92d2d/PERAN-PERSERIKATAN-BANGSA-BANGSA-DALAM-MENGHADAPI-SENGKETA-INTERNASIONAL.pdf). (03/05/23,08:30 WIB)

berkomitmen untuk menerapkan SDGs dan mencapai target-target yang ditetapkan dalam deklarasi upaya pemerintah untuk pencegahan stunting.

Prevalensi stunting di Lamongan merupakan salah satu yang terburuk di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Lamongan adalah 27,5% pada 2022, peringkat keempat terburuk di antara 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan jauh lebih tinggi daripada rata-rata provinsi dan nasional. Bahkan, angka ini naik 7% dibandingkan dengan prevalensi tahun 2021. Kabupaten Lamongan termasuk dalam daftar 100 kabupaten/kota Prioritas untuk penurunan stunting di Indonesia.<sup>8</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/985/2021 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Prioritas Intervensi Stunting Tahun 2021.<sup>9</sup> Jika dilihat perbandingan dengan daerah lain pada tahun 2021 Kabupaten Lamongan berada pada tingkat prevalensi stunting 7,1%, sedangkan Kabupaten Bojonegoro dengan tingkat pravelensi angka stunting 4,6% yang berada di bawah angka Kabupaten Lamongan. Maka dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki kondisi yang lebih urgent untuk diperhatikan dalam kasus penanganan stunting.

Dalam konteks SDGs, stunting merupakan isu penting yang terkait dengan kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu, upaya pencegahan

---

<sup>8</sup> Mastiur Lumban Tobing et al., "100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)," *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 13, no. 1 (2021): 238–44, [http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder\\_Volume1.pdf](http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Binder_Volume1.pdf).

<sup>9</sup> pemkab Lamongan, "Mengakselerasi Penurunan Stunting Melalui Kolaborasi Dengan Desa-Desa Di Lamongan," USAID, 2023, <https://www.program-erat.or.id/id/mengakselerasi-penurunan-stunting-melalui-kolaborasi-dengan-desa-desa-di-lamongan/>.(30/06/24,10:10 WIB)

stunting dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan melibatkan masyarakat, seperti implementasi program 1-10-100, memberikan edukasi kesehatan, penanaman buah oleh dokter, kegiatan bakti pengobatan spesialistik, dan program orang tua asuh stunting oleh IDI cabang Lamongan.<sup>10</sup>

Kabupaten Lamongan memiliki prevalensi stunting sebesar 24,4% pada tahun 2021, yang masih di atas batasan yang ditetapkan WHO (20%). Untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin II, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting. Beberapa upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan antara lain memenuhi asupan gizi yang cukup sebelum merencanakan kehamilan dan selama kehamilan, mencukupi asupan gizi, terutama selama 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, serta memberikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga telah melakukan beberapa program untuk mencegah stunting pada anak sebagai upaya mewujudkan SDGs, seperti implementasi program 1-10-100 dan memberikan edukasi Kesehatan. Prevalensi stunting di Indonesia menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 adalah 21,6%, yang berarti sekitar 1 dari 5 anak di Indonesia mengalami stunting. Dengan populasi total 279,5 juta jiwa, diperkirakan terdapat sekitar 59,6 juta anak yang mengalami stunting, berpotensi berdampak signifikan pada pembangunan sumber

---

<sup>10</sup> E. Prayitno, S. A., Utami, D. R., Safitri, N. M., Dewi, I. I., & Oktaviani, "SOSIALISASI PENCEGAHAN STUNTING MELALUI PELATIHAN PENGOLAHAN EKADO DI DESA GINTUNGAN, KECAMATAN KEMBANGBAHU, KABUPATEN LAMONGAN.," *DedikasiMU: Journal of Community Servic*, 5 (2023): 23–30, <https://journal.umg.ac.id/index.php/dedikasimu/article/view/5384>.

daya manusia Indonesia. Target penurunan stunting pada tahun 2030 adalah mengakhiri semua bentuk malnutrisi, termasuk mencapai target yang disepakati secara internasional pada stunting dan wasting pada anak di bawah usia 5 tahun pada tahun 2025.<sup>11</sup>

Target tersebut termasuk dalam SDGs poin II, yang juga mencakup pemenuhan kebutuhan gizi bagi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta orang tua. Target ini juga dijelaskan dalam Global Nutrition Targets,<sup>12</sup> yaitu mengurangi prevalensi stunting pada anak di bawah usia 5 tahun dari 29% pada tahun 2018 menjadi 15% pada tahun 2030. Target ini merupakan bagian dari poin II Zero Hunger, yang bertujuan untuk menciptakan dunia bebas kelaparan pada tahun 2030. Indikator umum stunting di Indonesia melibatkan penilaian berat badan sesuai tinggi badan dan tinggi badan sesuai usia. Stunting memiliki dampak jangka panjang yang serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit, dan dapat mempengaruhi prestasi akademik. Stunting, bersama dengan masalah malnutrisi atau kekurangan gizi, biasanya disebabkan oleh pola makan yang buruk, kondisi pencernaan yang tidak optimal, atau faktor penyakit lainnya.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Zahratul Jannah, "PENANGANAN STUNTING DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PADA DINAS KESEHATAN ACEH SKRIPSI," *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34765/>.

<sup>12</sup> Irma Fitriana Ulfah and Arief Budi Nugroho, "Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting Di Kabupaten Jember," *Jurnal Sosial Politik* 6, no. 2 (2020): 201–13, <https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.12899>.

<sup>13</sup> Ufiyah Ramlah, "Gangguan Kesehatan Pada Anak Usia Dini Akibat Kekurangan Gizi Dan Upaya Pencegahannya," *Ana' Bulava: Jurnal Pendidikan Anak* 2, no. 2 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.24239/abulava.vol2.iss2.40>.

Menurut keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang penetapan kabupaten/kota yang menjadi fokus intervensi penurunan kasus stunting terintegrasi pada tahun 2021,<sup>14</sup> Kabupaten Lamongan masuk dalam salah satu dari 260 kabupaten/kota di Indonesia sebagai fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi yang telah ditetapkan. Kebijakan pemerintah Kabupaten Lamongan mengadakan Lokarya dan Ferrameg sebagai upaya menangani Stunting di desa Sughiwaras kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. Lembaga Desa dapat dianggap sebagai salah satu aktor dalam pencapaian tujuan SDGs nomor dua, yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030. Hal ini karena Lembaga Desa memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan yang cukup bagi masyarakat di wilayah desa. Lembaga Desa dapat melakukan berbagai kegiatan seperti pengembangan pertanian, pengelolaan sumber daya alam, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketersediaan pangan dan akses terhadap pangan yang sehat dan bergizi. Selain itu, Lembaga Desa juga dapat berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial yang menjadi faktor penyebab utama kelaparan dan malnutrisi di wilayah desa.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena stunting adalah masalah kesehatan global termasuk Indonesia. Stunting

---

<sup>14</sup> Suriani Ginting, Adelima CR Simamora, and Nova Siregar, "Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Dengan Media Audiovisual Terhadap Perubahan Pengetahuan, Sikap, Dan Praktik Ibu Hamil Dalam Pencegahan Stunting Di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Husundutan Tahun 2021," *Journal of Healthcare Technology and Medicine* 8, no. 1 (2022): 2615–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.33143/jhtm.v8i1.1996>.



termasuk pada salah satu indikator SDGs poin ke II tentang (tanpa kelaparan).<sup>15</sup> Dalam mengupayakan hal tersebut dibutuhkan upaya dari pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan inovasi “ Gelang Penting ” Gerakan Lamongan Peduli Stunting pada tahun 2022 yang menjadi program unggulan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai target nasional penurunan angka stunting.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang maka rumusan masalah dari penelitian kali ini adalah tentang Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam upaya pencegahan stunting untuk mewujudkan *Sustainable development Goals (SDGs)* poin kedua tentang tanpa kelaparan (Zero Hunger)?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang nantinya ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan stunting untuk mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam poin kedua kasus pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan.

---

<sup>15</sup> Bapennas, “SDGs Metadata,” n.d., [https://sdgs.bapenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/\(01/07/24,10:10 WIB\)](https://sdgs.bapenas.go.id/metadata-indikator-sdgs/(01/07/24,10:10 WIB))

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Pencapaian hasil pada penelitian kali ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1.3.2.1 Manfaat Akademis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru kepada semua orang yang membacanya tentu saja juga diharapkan supaya dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada Ilmu Hubungan Internasional terkait teori dan konsep yang akan digunakan pada penelitian ini.

#### **1.3.2.2 Manfaat Praktis**

Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran dan masukan bagi pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan stunting di Kabupaten Lamongan.

#### **1.3.2.3 Manfaat Metodologis**

Manfaat Metodologis diharapkan penelitian ini supaya dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti terkait topik ini.

### **1.4 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini tentunya juga tidak terlepas dari penelitian sebelumnya sebagai bagian perumusan kerangka dari penelitian ini. Adapun penelitian sebelumnya yang dapat diketahui bahwasannya tempat penelitian ini pada penelitian yang pernah dilakukan dan menjadi sebuah acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)***

**Penelitian Pertama** adalah sebuah skripsi yang membahas tentang **Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Dalam bidang Kesehatan pencegahan Stunting di desa Tanete kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa** oleh M Husni Al Mubarak penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, yang mana metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki hasil deskripsi dari orang lain atau informan dalam bentuk kata baik secara lisan maupun tulisan, Penelitian ini membahas tentang objek sesuai dengan kenyataan yang telah terjadi ataupun belum terjadi di lapangan peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai fenomena implementasi sustainable development goals (SDGs) dalam bidang kesehatan pencegahan stunting Di Desa Tanete Kec. Tompobulu Kabupaten Gowa dengan hasil penelitian pengimplementasi harus menyambung komunikasi, karena menjalankan program atau kebijakan public harus komunikatif selain itu harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang kompeten untuk melakukan pencegahan stunting selanjutnya dalam pencegahan stunting pelaksanaan implementasi SDGs juga diperlukan disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual berupa Implementasi, Unsur-unsur Implementasi yang didalamnya terdapat unsur pelaksanaan program yang dilaksanakan dan target grup atau sasaran kelompok perbandingan dari penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan konsep penulis menggunakan konsep SDGs dan Kebijakan publik.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> V.A.R.Barao et al., "IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TANETE KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

**Penelitian Kedua** oleh situmeng dan putri tentang jurnal yang berjudul **Implementasi program tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Deveelopment Goals) pada kasus stunting di Indonesia** penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur menggunakan kerangka konseptual *sustainable development goals* (SDGs), Fenomena Stunting juga dengan upaya pemerintah Indonesia menangani stunting melalui sinegritas kementerian dan Lembaga di Indonesia, peran civitas akademika dalam menegah stunting dan peran institusi asing dalam mencegah stunting dengan hasil penerapan SDGs dilakukan oleh semua kalangan terutama pada kasus stunting semua kalangan memiliki kewajiban turut serta dalam pencegahan stunting perbedaan dengan penulis terletak pada penanganan stunting melalui sinegritas kementerian dan Lembaga di Indonesia sedangkan penulis menggunakan kebijakan public yang ada di Kabupaten Lamongan sebagai upaya dari pencegahan stunting untuk mewujudkan SDGs poin ke II.<sup>17</sup>

#### **1.4.2 Upaya Kebijakan Publik mencegah stunting**

**Penelitian Ketiga** jurnal **Gerakan kader posyandu sadar stunting di provinsi Lampung** oleh Riona Sanjaya, Hellen Febrianti, Septika yani Veronica, Hamid mukhlis menggunakan dengan hasil penelitian bahwa peranan kader posyandu sangat penting untuk pengawasan balita agar terhindar dari stunting selain itu penguatan kader posyandu juga termasuk salah satu pemberdayaan yang

---

<sup>17</sup> Sindy Yulia Putri, "Implementasi Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) Pada Kasus Stunting Di Indonesia," *Jurnal PIR : Power in International Relations* 5, no. 2 (2021): 163, <https://doi.org/10.22303/pir.5.2.2021.163-174>.

sudah ada sebagai program intervensi di bidang Kesehatan, posyandu dapat dimanfaatkan sebagai sarana mengatasi permasalahan stunting Kesimpulan yang di dapatkan dari jurnal ini adalah kader posyandu sangat penting dalam pemantauan pertumbuhan balita sehingga peningkatan sumber pengetahuan dan motivasi kader sangat diperlukan. Perbandingan dengan penelitian penulis ada pada manfaat kader posyandu penulis menekankan bahwa kader adalah membantu dalam pencegahan stunting namun tanggung jawab besar tetap terletak pada keluarga masing-masing untuk lebih peduli dan turut serta dalam pemantauan perkembangan balita.<sup>18</sup>

**Penelitian keempat** jurnal dengan mengangkat judul **Penyuluhan Pencegahan Stunting pada Anak dalam Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Jaya Bakti dan Desa Lambangan Kecamatan Pagimana** yang ditulis oleh Hartono.H, Suprianto.& Yoyanda.B.menggunakan metode pelaksanaan yang diikuti oleh kader posyandu dan semua masyarakat terutama yang memiliki anak balita penelitian ini menggunakan pendekatan Partisipasif yaitu menggunakan pelaksanaan Pendidikan terhadap masyarakat dengan pihak akademisi (dosen pembimbing) hasilnya kegiatan pemberdayaan posyandu dan edukasi menyusui atau Asi Eksklusif sangat memiliki peran penting dan juga sangat bermanfaat untuk pencegahan stunting pada balita.perbandingan dengan penulis yakni pendekatan penulis menggunakan pemantauan bagi balita yang terkena stunting juga penekanan pada kebijakan public yang ada di Kabupaten Lamongan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Riona Sanjaya et al., “Gerakan Kader Posyandu Sadar Stunting Di Provinsi Lampung,” *Indonesia Berdaya* 3, no. 1 (2022): 27–32, <https://doi.org/10.47679/ib.2022173>.

<sup>19</sup> Hartono Hadjarati et al., “Penyuluhan Pencegahan Stunting Pada Anak Dalam Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals ( Sdgs ) Di Desa Jaya Bakti Dan Desa Lambangan Kecamatan

**Penelitian Kelima** penelitian dengan mengambil judul **Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember** yang ditulis oleh Ima.F.U & Arief.B.N dengan metode menggunakan kualitatif yang menjelaskan suatu fenomena menggunakan data sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin penelitian ini menggunakan teori pembangunandan kebijakan Kesehatan. hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat beberapa factor dari terjadinya stunting yakni pernikahan dini, Pendidikan rendah dan masalah ekonomi yang menjadi salah satu factor dari terjadinya kasus stunting perbadningan dengan penulis terletak di teori konsep penulis menggunakan teori kebijakan public dan konsep SDGs untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan kasus pencegahan stunting di kabupaten Lamongan.<sup>20</sup>

**Penelitian Keenam** dengan judul penelitian **Peran Keluarga Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Kuman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan** hasilnya kebijakan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa sehingga dapat mempermudah pelaksanaannya oleh Ardiana.P & Riska.A dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwasannya apabila semua turut mengambil peran dalam kebijakan public karena dasarnya semua memiliki kepentingan meskipun dibilang tidak ikut di situ maka dengan ini dapat di ambil pelajaran jika semua turut andil atau turut memberikan dukungan dan support kalian maka semua

---

Pagimana Stunting Prevention in Children in Achieving the Objectives of the Sustainable Development Goals,” *JPKM: Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat* 3, no. 1 (2022): 2–14, <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jpkm/index>.

<sup>20</sup> Ulfah and Nugroho, “Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia: Faktor Penyebab Stunting Di Kabupaten Jember.”<https://doi.org/10.22219/>.

hal dapat dengan mudah berjalan dengan baik dan benar perbandingan dengan penulis menuliskan pada penelitian bahwa warga desa tidak hanya memberikan dukungan tetapi ikut turut serta dalam pencegahan stunting desa mereka masing-masing sehingga dapat memberikan dampak yang baik pada Kawasan sekitar.<sup>21</sup>

**Penelitian Ketujuh** adalah jurnal berisikan tentang **Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting** penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian qualitative pendekatan paradigma, Konstruktivisme dan strategi ferminologi dari hasil penelitian yang ada di jurnal ini hasilnya belum ada wadah dan banyaknya pernikahan dini menjadi factor kasus stunting oleh Handiana. Handriani, Muliani, & Siti.H.B dari penelitian ini juga Berhasil di temukan upaya pencegahan dan penanganan stunting di kabupaten Donggala, yang terdiri dari 4 cara yakni pada intervensi berdasarkan sanitasi dasar masyarakat adalah 1.penyediaan akses terhadap air bersih, 2.penyediaan jamban, 3.penyediaan sarana pembangunan air limbah,dan 4. pembuangan sampah dan di temukan 4 solusi yakni seperti memberikan ketersediaan layanan KIA dan KB, memberikan ketersediaan jaminan pada kesehatan bagi seluruh warga yang kurang mampu, memberikan fasilitas pendidikan dan perbaikan gizi pada balita stunting, dan juga pernikahan dini. Perbandingan dengan penulis terletak pada cara atau upaya penanganan stunting penulis menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan dengan mengikuti kebijakan public yang ada seperti lokarya dan ferrameg di Kabupaten Lamongan dan hal ini

---

<sup>21</sup> Ardiana Priharwanti and Riska Amalia, "Peran Keluarga Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Kauman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan," *Abdimayuda*, no. December 2021 (2022): 40–48, <https://doi.org/10.19184/abdimayuda.v>.

dilakukan di semua Kawasan yang berada di kabupaten Lamongan hingga penjuru desa terpencil dan paling pelosok yang ada di Lamongan.<sup>22</sup>

**Tabel 1. 1Posisi Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	M Husni Al Mubarak (2022)	IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM BIDANG KESEHATAN PENCEGAHAN STUNTING DI DESA TANETE KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA	Berdasarkan hasil penelitian ini pengimplementasian harus memiliki komunikasi dengan baik supaya penggunaan sumber daya tidak sia-sia dalam menjalankan program pencegahan stunting, selain itu pemerintah Desa Tanete sendiri harus mempunyai sikap yang tegas dan mempunyai struktur birokrasi yang kuat karna semua itu yang akan menjadi faktor menunjang kesuksesan implementasi pencegahan stunting yang di lakukan di Desa Tanete Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa
2.	Situmeang & Putri (2021)	Implementasi program tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada kasus stunting di Indonesia	Berdasarkan hasil penelitian ini menggunakan konsep Sustainable development Goals (SDGs) konsep SDGs merupakan konstruksi dari berbagai interdisiplin ilmu, mulai dari studi pembangunan, relasi antar negara, relasi antar bangsa, peran state dan non-state dalam pembangunan, globalisasi, transfer of knowledge (ToK), transfer of technology (ToT), dan ekonomi politik internasional. Dengan demikian, unit analisis SDGs juga beragam, mulai dari pemerintah/state actor, lobikepentingan, non-state actor, aktivis, hingga individu. sebagai upaya pemerintah Indonesia menangani stunting melalui

<sup>22</sup> Hadina Hadina et al., "Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting," *Faletehan Health Journal* 9, no. 02 (2022): 176–84, <https://doi.org/10.33746/fhj.v9i02.331>.



			sinergitas kementerian dan lembaga di Indonesia, dari prespektif hubungan internasional beragam aktor non negara dapat ikut serta berpartisipasi dalam kasus stunting dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kapasitas untuk meminimalisir prevalensi kasus stunting.
3.	Riona Sanjaya, Hellen Febrianti, Septika yani Veronica, Hamid mukhlis (2022)	Gerakan kader posyandu sadar stunting di provinsi Lampung	Peranan kader sangat penting pada pemantauan balita, maka peningkatan pengetahuan sangat penting untuk para kader.
4.	Hartono.H , Suprianto. & Yoyanda. B. (2021)	Penyuluhan Pencegahan Stunting pada Anak dalam Mencapai Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Jaya Bakti dan Desa Lambangan Kecamatan Pagimana	Bahwa adanya kegiatan pemberdayaan terhadap kader posyandu sangat bermanfaat dalam pencegahan stunting pada balita
5.	Ima.F.U & Arief.B.N (2020)	Menilik Tantangan Pembangunan Kesehatan Di Indonesia : Faktor Penyebab Stunting di Kabupaten Jember	Terdapat beberapa masalah social ekonomi yang memprngaruhi terjadinya stunting, pernikahan dini menjadi salah satu factor penyebab karena ketidak siapan orang tua dalam mengasuh anak.
6.	Ardiana.P & Riska.A (2022)	Peran Keluarga Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting pada Masa Pandemi Covid 19 di Desa Kuman RT 16 RW 08 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan	Seluruh program intervensi mendapatkan dukungan dari warga desa setempat, sehingga dapat mempermudah pelaksanaan

7.	Handiana. Handriani, Muliani, & Siti.H.B (2022)	Upaya Pencegahan Dan Penanganan Stunting	Upaya penanganan stunting oleh pemerintah pada intervensi Kesehatan belum ada wadah edukasi bagi remaja dan banyaknya pernikahan dini
----	---	--	---

## 1.5 Kerangka Konseptual

### 1.5.1 *Sustainable Development Goals (SDGs)*

SDGs atau yang biasa dikenal dengan Sustainable Development Goals lahir dari kegiatan konferensi terkait pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh perserikatan bangsa-bangsa. Ke 70 tepatnya bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat menjadi awal perjalanan baru dalam pembangunan global. Semua anggota PBB bersepakat untuk agenda pembangunan universal baru tertuang dalam dokumen dengan judul *Transforming Our World: the 2030*

Tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, yang mana hal ini telah diadopsi oleh semua negara anggota perserikatan bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2015. SDGs dan memiliki 17 Tujuan Berkelanjutan<sup>23</sup>

1. Tanpa kemiskinan (no poverty) tujuan poin pertama ini adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk.
2. Tanpa kelaparan (zero hunger) tujuan kedua tentang mengakhiri kelaparan, Kelaparan yang dimaksud di sebabkan oleh kekurangan nutrisi.
3. Kehidupan sehat dan sejahtera (good health and well-being) tujuan ini tentang menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan masyarakat pada semua golongan usia.

<sup>23</sup> UN Department of Economic and Social Affairs (2022) Department of Economic and Social Affairs Progress and Info <https://www.un.org/development/desa/dpad/> (23/06/23,09:05 WIB)

4. Pendidikan berkualitas (quality education) tujuan keempat akan menyetarakan tingkat Pendidikan yang berkualitas dengan jaminan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang karena Pendidikan akan memacu capaian terhadap salah satu tujuan SDGs.
5. Kesetaraan gender (gender equality) tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga anak perempuan.
6. Air bersih dan sanitasi layak (clean water and sanitation) poin dari tujuan keenam yaitu jaminan ketersediaan terhadap pengelolaan air dan sanitasi.
7. Energi bersih dan terjangkau (affordable and clean energy) tujuannya untuk jaminan akses energi yang terjangkau harus efisien dan sebisa mungkin terbaru.
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (decent work and economic growth) tujuan dari poin kedelapan yakni tentang promosi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif dan berkelanjutan.
9. Industri, inovasi dan infrastruktur (industry, innovation and infrastructure) poin Sembilan tentang infrastruktur yang Tangguh karena hal ini termasuk pendorong pertumbuhan ekonomi.
10. Berkurangnya kesenjangan (reduced inequality) poin kesepuluh membahas tentang mengurangi ketimpangan pada negara karena saat ini kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan (sustainable cities and communities) tujuan ini adalah membuat perkotaan dan juga permukiman manusia menjadi inklusif, aman, Tangguh dan berkelanjutan.

12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (responsible consumption and production) Tujuan poin ke duabelas untuk jaminan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Penanganan perubahan iklim (climate action) Tujuan ini untuk pengambilan tindakan secepat mungkin sebab untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Ekosistem lautan (life below water) Poin selanjutnya ke empat belas yang membahas tentang pelestarian dan pemanfaatan samudra, laut dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Ekosistem daratan (life on land) Poin ini akan membahas tentang perlindungan dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan pada ekosistem darat.
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh (peace, justice, and strong institutions) Poin ke enam belas ini akan membahas tentang menguatkan masyarakat untuk perdamaian untuk pembangunan berkelanjutan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan (partnership for the goals) Poin yang terakhir dari pembangunan berkelanjutan SDGs adalah untuk kerja sama global sebagai cara untuk mencapai tujuan berkelanjutan.

Mereka sadar penuh bahwa mengakhiri kemiskinan dan kelaparan juga kekurangan lainnya harus berjalan seiring dengan strategi yang meningkatkan kesehatan dan pendidikan, mengurangi kesenjangan, dan memacu pertumbuhan ekonomi. SDGs dibangun di atas kerja keras puluhan tahun oleh negara-negara dan PBB, termasuk Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB. Jumlah orang yang menghadapi kelaparan dan kerawanan pangan telah meningkat sejak 2015, dengan

pandemi, perubahan iklim konflik, dan ketidaksetaraan yang semakin memperburuk situasi. Pada 2015, 589 juta orang mengalami kelaparan, dan pada 2021, angka itu meningkat menjadi 768 juta. Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2030, sekitar 670 juta orang masih akan menghadapi kelaparan – 8% dari populasi dunia, sama dengan tahun 2015. Terlepas dari upaya global, terlalu banyak anak yang terus menderita kekurangan gizi atau biasa dikenal dengan malnutrisi juga tingkat penurunan stunting tahunan saat ini harus meningkat 2,2 kali untuk memenuhi target global. Untuk mencapai nol kelaparan pada tahun 2030, diperlukan upaya segera dan juga intensif untuk mengubah sistem pangan, memastikan ketahanan pangan, dan berinvestasi dalam praktik pertanian berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs poin kedua adalah salah satu tujuan yang menghasilkan dari diskusi anggota PBB pada tahun 2015 melalui poin kedua yaitu tanpa kelaparan.<sup>24</sup>

Tujuan kedua dari Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk mengakhiri kelaparan dan mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termasuk ke dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja pada SDGs poin kedua tentang zero hungry dan upaya penanganan tanpa kelaparan. Untuk mencapai TPB Poin II ada beberapa langkah yang dapat diambil seperti peningkatan investasi pada pertanian berkelanjutan melalui dukungan kepada petani kecil dan promosi agroekologi dan mengurangi limbah pangan, memastikan akses terhadap pangan yang aman dan bergizi dengan

---

<sup>24</sup> Ibid

mendukung pemberian ASI eksklusif, mempromosikan pola makan sehat, dan menangani ketahanan pangan melalui program bantuan sosial dan investasi di pedesaan, serta mempromosikan sistem pangan yang berkelanjutan dengan mengurangi kehilangan pangan, berinvestasi dalam infrastruktur pangan, dan mendukung perdagangan berkelanjutan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan, serta melestarikan lingkungan

### **1.5.2 Kebijakan Publik**

Teori konsep kebijakan publik dari Budi Winarno mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Berikut adalah beberapa konsep dan teori yang dijelaskan dalam buku "Teori dan Proses Kebijakan Publik" oleh Budi Winarno: Pengertian Kebijakan Publik: Kebijakan publik adalah hubungan antara unit pemerintah dengan masyarakat, yang melibatkan perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Proses Kebijakan Publik melibatkan beberapa tahapan, seperti perumusan masalah kebijakan, pembentukan kebijakan, implementasi kebijakan, dampak, evaluasi, perubahan. dan terminasi Budi Winarno mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai suatu program, proyek pembangunan, atau undang-undang. Budi Winarno mengingatkan juga bahwa birokrasi adalah instrument untuk membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah. Konsep kebijakan publik menurut Budi Winarno mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi

kebijakan, dan evaluasi. Buku "Teori dan Proses Kebijakan Publik". Salah satu contoh teori yang dijelaskan dalam buku tersebut adalah teori birokrasi publik. Budi Winarno dalam bukunya "Teori dan Proses Kebijakan Publik" menjelaskan konsep kebijakan publik, termasuk tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi. Ia menekankan pentingnya memahami apa yang sebenarnya dilakukan dalam mendefinisikan kebijakan, bukan hanya apa yang diusulkan. Buku ini membahas berbagai konsep, teori, dan model dalam kebijakan publik untuk memahami proses perumusan dan pembentukan kebijakan publik, implementasi kebijakan, dampak, evaluasi, perubahan, dan terminasi kebijakan publik. Salah satu contoh teori yang dijelaskan adalah teori birokrasi publik.<sup>25</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan meliputi adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Selain itu, kerangka kebijakan publik juga ditentukan oleh beberapa variabel, seperti tujuan yang akan dicapai, preferensi nilai, sumber daya yang mendukung kebijakan, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, lingkungan, dan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri khusus kebijakan publik antara lain merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan, terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan, bersangkutan paut dengan apa yang dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, dan mungkin berbentuk positif atau negatif.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Winarno, B. (2007). *Public Policy: Theory and Process Revised Edition*, Presindo Media. Yogyakarta: *Public Policy Model and Policy Change Theory-Revised Edition*, 251.

<sup>26</sup> Solichin Abdul Wahab, "Analisis Kebijakan," 2016, 11-47, [https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ&lpg=PA11&ots=O6\\_f21xZC4&dq=anali](https://books.google.co.id/books?id=mHorEAAAQBAJ&lpg=PA11&ots=O6_f21xZC4&dq=anali)

Kebijakan public adalah suatu proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan pihak yang berpengaruh dalam menciptakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan. Kebijakan publik juga dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan, dan hasil akhir kebijakan.

## **1.6 Metode penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan karakteristik rinci yang berkaitan dengan fenomena atau masalah tertentu. Fokus pada jenis penelitian deskripsi ini adalah sifat dari suatu populasi, situasi, atau objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan secara rinci mengenai elemen-elemen yang ada serta menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti "what", "where", "who", "when", "why", dan "how" yang berkaitan dengan topik penelitian kali ini fenomena mengenai upaya Implementasi sustainable development goals (SDGs) dalam bidang kesehatan Pencegahan Stunting oleh pemerintah Di Kabupaten Lamongan.<sup>27</sup>

### **1.6.2 Metode Analisis**

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna. Penelitian kualitatif memiliki dua

---

si kebijakan solichin&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q=analisi kebijakan solichin&f=false. (03/07/23,13:10 WIB)



tujuan utama, yaitu, memaparkan dan mengeksplorasi, yaitu untuk menggambarkan suatu fenomena secara menyeluruh dan mendalam. Memaparkan dan menjelaskan, yaitu untuk menjelaskan suatu fenomena dengan memberikan penjelasan yang terperinci. Tujuan lainnya dari penelitian kualitatif adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran untuk tindakan atau perbuatan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena data yang dihasilkan berupa data deskriptif-kualitatif. Data deskriptif-kualitatif adalah data yang berupa tulisan, kata-kata, dan dokumen yang berasal dari informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang ada dalam penelitian ini berisi uraian kata-kata, bukan berupa angka-angka. Dimana nantinya penelitian ini akan mendeskripsikan terkait metode ini berupaya untuk menjawab kondisi pemahaman terkini tentang suatu topik. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang berlangsung dan akan melaporkan fakta terbaru, memberikan ringkasan informasi berupa lisan maupun tulisan yang nantinya hasil dari wawancara akan di cantumkan di artikel ini.<sup>28</sup>

### **1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1.6.3.1 Batasan Waktu**

Analisa ini dilihat dari tahun 2021-2023 dimana pemerintah mulai gencar dengan tingginya kasus stunting setelah adanya covid dengan ketidak stabilan faktor kesehatan serta perekonomian masyarakat Indonesia dan banyaknya yang terkena PHK membuat angka stunting Kembali meningkat, disebabkan hal tersebut

---

<sup>28</sup> L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 1989, <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000793890148864>. [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34765/\(04/07/23,07:05 WIB\)](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34765/(04/07/23,07:05%20WIB))

Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan upaya pengetasan stunting dengan kebijakan yang ada di Kabupaten Lamongan.

### **1.6.3.2 Batasan Materi**

Batasan materi disini memiliki tujuan untuk pembahasan agar tidak keluar dari kerangka penelitian yang akan di teliti sehingga dalam Batasan materi ini penulis akan mengulas tentang upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan stunting untuk mewujudkan poin SDGs yang kedua.

### **1.6.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik primer yang mana jenis data ini adalah yang akan dikumpulkan peneliti dari sumber utama melalui :

#### **1. Observasi**

Observasi berguna untuk mengetahui tentang subjek dan objek penelitian dengan cara peneliti melakukan turun langsung ke lapangan guna mendapat fenomena langsung dari lapangan tentang upaya pencegahan stunting di kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan sumber informan yang berkaitan ataupun responden sesuai dengan informasi jenis data yang di butuhkan dalam penelitian.

Wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi mengenai suatu masalah yang terkait, dengan cara peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan guna mendapat informasi lebih dalam terkait topik. Adapun wawancara akan dilakukan kepada Bapak Abdul Rofi,

S.H selaku narasumber dari bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia (PPM) Kantor Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPELITBANGDA) yang menangani kasus stunting dan SDGs pada Kabupaten Lamongan. Wawancara ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai upaya pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pencegahan stunting untuk mewujudkan SDGs poin II.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara mencari sumber data mengenai hal berupa catatan peristiwa yang telah berlalu, Dokumentasi juga bisa berbentuk tulisan atau gambar monumental dari seseorang Teknik dokumentasi ini dapat menjadi pendukung dari observasi dan wawancara dalam keabsahasan data. Adapun dokumen yang akan di lampirkan berkaitan dengan dokumentasi dari upaya pencegahan stunting di Kabupaten Lamongan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian. Pemilihan teknik pengumpulan data yang tepat disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dan tujuan yang ingin dicapai.

#### 1.7 Argumen Pokok

Stunting merupakan isu kesehatan global yang berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Kabupaten Lamongan menghadapi masalah stunting yang serius, yang mencerminkan buruknya ketahanan pangan dan rendahnya kualitas gizi. Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan berbagai program, seperti penyuluhan gizi dan pemberian

makanan tambahan kepada ibu hamil dan anak balita, serta sosialisasi kesehatan ibu dan anak untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi seimbang.

Upaya pencegahan stunting di Lamongan melibatkan kerja sama multisektoral dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi internasional, LSM, sektor swasta, dan komunitas lokal. Sinergi ini memperkuat dan memastikan keberlanjutan program yang ada. Mengatasi stunting tidak hanya meningkatkan kualitas hidup dan potensi generasi muda tetapi juga memperkuat ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat. Inovasi dan *best practices* dari Lamongan diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain, memberikan rekomendasi kebijakan efektif di tingkat nasional dan internasional, serta berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin II. penelitian ini menggunakan konsep SDGs dan kebijakan publik yang mana konsep ini merupakan konsep yang relevan untuk mengkaji penelitian upaya pencegahan stunting yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Lamongan dengan menggunakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat luas.

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini bertema Upaya Pencegahan Stunting dalam mewujudkan SDGs poin II: Studi kasus Kecamatan Kalitengan-Lamongan, Untuk mengetahui lebih jelas maka materi yang tertera pada penelitian kali ini akan dikelompokkan pada beberapa bab dan juga sub bab yang ada pada tabel berikut:

**Tabel 1. 2 Sistematika Penulisan**

<b>BAB</b>	<b>ISI</b>
<p><b>BAB I</b></p> <p><b>PENDAHULUAN</b></p>	<p>1.1 Latar Belakang</p> <p>1.2 Rumusan Masalah</p> <p>1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian</p> <p>1.3.1 Tujuan Penelitian</p> <p>1.3.2 Manfaat penelitian</p> <p>    a. Secara teoritis</p> <p>    b. Secara praktis</p> <p>    c. Manfaat metodologis</p> <p>1.4 Penelitian Terdahulu</p> <p>1.5 Landasan Konseptual</p> <p>1.5.1 SDGs</p> <p>1.5.2 Kebijakan Publik</p> <p>1.6 Metode Penelitian</p> <p>1.6.1 Jenis Penelitian</p> <p>1.6.2 Metode Analisis</p> <p>1.6.3 Ruang lingkup penelitian</p> <p>1.6.3.1 Batasan waktu</p> <p>1.6.3.2 Batasan Materi</p> <p>1.6.3.3 Teknik pengumpulan data</p> <p>1.7 Argumen Pokok</p> <p>1.8 Sistematika Penulisan</p>

<p><b>BAB II</b></p> <p><b>PENERAPAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DALAM POIN-II SDGS</b></p>	<p>2.1 Penerapan Sustainable Development Goals di Indonesia</p> <p>2.2 Fenomena Stunting di Kabupaten Lamongan</p> <p>2.3 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Pencegahan Permasalahan Stunting</p>
<p><b>BAB III</b></p> <p><b>ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TERHADAP UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI LAMONGAN</b></p>	<p>3.1 proses pembentukan kebijakan pemerintah kabupaten Lamongan tentang stunting sebagai penerapan Sdgs poin II</p> <p>3.1.1 tahapan perumusan kebijakan stunting di kabupaten Lamongan menurut Budi Winarno</p> <p>3.1.2 Regulasi pemerintah Kabupaten Lamongan dalam peraturan Bupati (perbup) kabupaten Lamongan no 7 tahun 2019</p> <p>3.2 Program inovasi pemerintah kabupaten Lamongan sebagai implementasi kebijakan stunting di Lamongan</p>

<b>BAB IV</b>	4.1 Kesimpulan
<b>PENUTUP</b>	4.2 Saran

